

PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DALAM TATA KELOLA KEBERSIHAN DI JALUR PEDESTRIAN IR. H. DJUANDA KOTA SUKABUMI

M. Rijal Amirulloh^{1*}, Maulana Mansyur², Citra Melinda Z³, Zavitha Tri Pracila⁴, Desi Nuralisa⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Kota Sukabumi, Indonesia

*Korespondensi : mrijalamirulloh@ummi.ac.id

ABSTRAK

Di Kota Sukabumi salah satu jalur pejalan kaki utama di pusat kota di Ir. H. Djuanda. Namun demikian, kondisi pejalan kaki Ir. H. Djuanda saat ini masih belum optimal. Tujuan penelitian untuk menekankan pentingnya peran aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan jalur pedestrian Ir. H. Djuanda. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Peran sebagai suatu kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang didukung oleh Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka Hijau. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mencakup kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan lainnya. Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang terbukti memelihara berbagai strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran masyarakat. Dinas bertanggung jawab atas berbagai aspek kebersihan, termasuk menyediakan tempat sampah yang memadai, pengangkutan sampah secara teratur, pembersihan sampah yang berserakan, serta pelatihan dan pengawasan masyarakat untuk mematuhi peraturan kebersihan. pentingnya peran aktif Dinas dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan pejalan kaki, serta pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dan kebersihan.

Kata Kunci : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Peran, Kebijakan, Strategi, Komunikasi.

ABSTRACT

In Sukabumi City, one of the main pedestrian routes in the city center is Ir. H. Juanda. However, the condition of pedestrian Ir. H. Djuanda is currently still not optimal. The purpose of the study is to emphasize the importance of the active role of the Public Works and Spatial Planning Department and community participation in maintaining the cleanliness and comfort of the Ir. H. Djuanda pedestrian path. In this research, the author used descriptive qualitative research methods. The role as a policy of the Public Works and Spatial Planning Department is supported by Sukabumi Mayor Regulation No. 2 of 2015 concerning the provision and use of green open space. The strategic role of the Public Works and Spatial Planning Department includes close collaboration with other stakeholders. The Department of Public Works and Spatial Planning has been proven to maintain various communication strategies to convey information and build public awareness. The Department is responsible for various aspects of cleanliness, including

providing adequate rubbish bins, regular transport of rubbish, cleaning up scattered rubbish, as well as training and supervising the public to comply with cleanliness regulations. the importance of the Department's active role in maintaining cleanliness and comfort for pedestrians, as well as the importance of community participation in waste management and cleanliness efforts.

Keywords : *Public Works and Spatial Planning Department, Role, Policy, Strategy, Communication.*

A. PENDAHULUAN

Di Kota Sukabumi, terdapat pedestrian Ir. H. Djuanda yang merupakan salah satu jalur pedestrian utama di pusat kota. Namun demikian, kondisi pedestrian Ir. H. Djuanda saat ini masih belum optimal. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kebersihan di area pedestrian. Kondisi pedestrian yang kotor dan tidak terawat dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti menyebabkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki, meningkatkan risiko kecelakaan dan menurunkan estetika kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan tata kelola kebersihan di pedestrian Ir. H. Djuanda. Salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi.

Kasi Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi menjelaskan bahwa ada beberapa titik yang menjadi sasaran program, salah satunya program Ridwan Kamil memiliki strategi bahwa konsep sederhana menjadikan kota itu maju atau tidak dilihat dari bangunan kota tersebut serta dipengaruhi oleh beberapa tempat yg menggunakan konsep ekonomi berbasis selfie, dimana tempat selfie disitulah ekonomi berputar sebagai daya tarik. Tujuan lain dibuatnya pedestrian itu adalah untuk memajukan rakyatnya terlebih dahulu, namun terdapat beberapa permasalahan pada pedagang kaki lima

yang membuang sampah sembarangan, dan sampah yang dihasilkan dapat mencapai 3 pick up akhirnya pemerintah melakukan sosialisasi ke pedagang-pedagang tersebut untuk buang sampah pada tempatnya.

Adapun petugas kebersihan dan penghijauan untuk konsep yang ada serta jalur pedestrian jalan Ir. H. Djuanda bisa disebut taman pasif juga. Adapun salah satu komponen pariwisata agar wisatawan luar Kota Sukabumi bisa datang ke Kota Sukabumi itu dengan memberi kebersihan yang terbaik di pedestrian agar nyaman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, di tegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan ruang terbuka hijau termasuk di pedestrian. Adapun Peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, diatur mengenai pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk pedestrian, untuk menjaga pedestrian dan keindahan lingkungan.

Berdasarkan regulasi-regulasi di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi memiliki peran dan tanggung jawab dalam tata kelola kebersihan di Pedestrian Ir. H. Djuanda yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang bertanggung jawab untuk menyediakan tempat sampah yang memadai di sepanjang pedestrian,

mengangkut sampah dari tempat sampah di pedestrian secara berkala, membersihkan sampah yang berserakan di pedestrian, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan di pedestrian, dan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang bertanggung jawab untuk memelihara taman di sepanjang pedestrian agar tetap bersih dan rapi.

Pentingnya fasilitas publik yang aman, nyaman, dan mudah diakses bagi seluruh lapisan masyarakat. Pedestrian merupakan salah satu fasilitas publik yang sangat penting dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat dan memberikan ruang untuk beraktivitas di luar ruangan. Dengan demikian, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas publik yang mendukung hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik, dan pedestrian merupakan salah satu dari fasilitas tersebut.

Dengan adanya fasilitas pedestrian yang baik, masyarakat dapat melakukan aktivitas berjalan kaki dengan nyaman, yang dapat mendukung gaya hidup sehat, bersih dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Tata Kelola Kebersihan di Pedestrian Ir. H. Djuanda Kota Sukabumi".

Administrasi Publik

Istilah administrasi sangat populer di masyarakat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari Kita sering menggunakan istilah administrasi, misalnya ketika berhadapan dengan suatu instansi atau organisasi baik publik atau swasta untuk memenuhi kebutuhan karena manusia bisa menggunakan kreativitas atau ide,

kemauan, rasa, atau hati dalam kegiatan tersebut. Administrasi atau administratie (Dalam bahasa Belanda) adalah istilah yang biasa dipahami sebagai proses pembuatan catatan, surat menyurat, dan tugas-tugas administrasi dan di butuhkan manajemen. Sehingga dapat di katakan Manajemen digambarkan sebagai pengumpulan dan pencatatan informasi secara sistematis untuk tujuan menyediakan informasi dan memfasilitasi pengambilan dokumen yang diperlukan.(Hidayah et al., 2021).

Administrasi Publik (Inggris:Public Administration) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. (Tua, D., Darma, P: 2021).

Administrasi publik adalah aktivitas aktivitas kerjasam ayang dilakukan oleh para penyelenggara negara dalam menata dan mengelola suatu kebijakan pemerintah dalam suatu negara yang di tentukan sebelumnya secara eefektif dan efisien. (Viera Valencia & Garcia Giraldo, 2019).

Adapun menurut Syafiie, (2016:24) "Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai oragnisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan". Ruang Lingkup administrasi publik yang meliputi organisasi publik, kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik serta kepemimpinan dan pelayanan publik. (Hajar, S: 2022).

Peranan administrasi publik dalam masyarakat, adalah: Pertama, administrasi publik berperan menjamin pemerataan

distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat. Kedua, administrasi publik berperan melindungi hak-hak pribadi masyarakat atas pemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk melaksanakan tanggung-jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia. Ketiga, administrasi publik berperan melestarikan nilai-nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi itu dari satu generasi kegenerasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi dan selaras dengan budaya lain di lingkungannya (Hendrayady et al., 2022). Seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. (Wibowo & Zainal, 2020)

Peran

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek-aspek diantaranya, Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan maupun organisasi.

Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. (Megi :2020). Peran didayagunakan sebagai cara untuk mengurangi dan menghilangkan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada (Asri et al., 2019).

Mengenai peran ini, Arimbi (dalam skripsi Anggi Jalaludin: 2017) membagi peran menjadi beberapa dimensi antara lain; a) Peran sebagai suatu kebijakan, paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik dilaksanakan. b) Peran sebagai strategi, paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas. c) Peran sebagai alat komunikasi, peran didayagunakan sebagai instrumen atau pengambilan keputusan. Persepsi ini didasarkan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani rakyat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan secara refrensif. d) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan yang dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan juga kerancuan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan demikian penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data tentang peran dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam tata kelola kebersihan di jalur pedestrian Ir. H. Djuanda Kota Sukabumi yang kemudian di deskripsikan atau digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan.

Pada penelitian ini yang menjadi indikator adalah analisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, khususnya pada bidang tata bangunan dan yang terfokus pada tata kelola kebersihan di pedestrian. Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Unit Analisis dan Setting Informan

Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek atau sasaran penelitian, sasaran yang dijadikan analisis atau fokus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah peran dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam tata kelola kebersihan di jalur pedestrian Ir. H. Djuanda Kota Sukabumi. Peneliti akan menggunakan beberapa informan ataupun narasumber untuk mendapatkan data dan informasi peran dinas pekerjaan umum dan tata ruang dalam tata kelola kebersihan di jalur pedestrian Ir. H. Djuanda Kota Sukabumi.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Penelitian kualitatif yang datanya diambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka contoh untuk masing-masing sumber datanya mencakup 3 hal tersebut. Yaitu data yang didapatkan dari hasil wawancara, hasil observasi langsung di lapangan sertabukti dokumentasinya. (Amtai Alaslan. et al., 2023).

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan terorganisir secara lengkap untuk pengumpulan datanya.

b. Observasi

Observasi, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat perilaku atau kejadian yang terjadi di lapangan. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tergantung pada jenis data yang ingin dikumpulkan (Amtai Alaslan. et al., 2023). Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk menangkap gejala yang sedang diamati, seperti apayang sudah ditangkap, dicatat, dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan seperti, peraturan Undang-Undang dan peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto dan sketsa dan lain-lain. Studi dokumentasi dalam

penelitian ini digunakan sebagai perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Validasi Data

Validasi data adalah penting dalam penelitian kualitatif untuk melihat keabsahan data. Jika data tidak valid, maka hasil analisis datanya pun tidak valid. Akibatnya, hasil penelitian juga tidak bisa diterima. Teknik validasi data pada penelitian kualitatif sering disebut dengan triangulasi. (Amtai Alaslan, et al., 2023).

Uji Kredibilitas

Keterpercayaan data atau menguji kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi dan member check.

a. Triangulasi

Triangulasi adalah data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu data-data yang dapat ditelusuri asal-usulnya bukan data interpretasi atau penafsiran peneliti. Triangulasi adalah untuk menghindari hadirnya bias seperti yang diduga oleh kaum positivistik. Bias adalah persoalan serius dalam riset kualitatif. Tak lain karena peneliti “wajib” berpartisipasi bersama partisipan. Sehingga, partisipasi dianggap memunculkan keraguan (Amtai Alaslan, et al., 2023).

b. Member Check

Member check adalah proses verifikasi data yang berasal dari penyedia data. Member check bertujuan untuk memeriksa seberapa cocok data yang diterima dengandata yang diberikan oleh penyedia data, berarti apakah data tersebut valid. Untuk mengetahui ketepatan (*accuracy*) hasil riset. Secara teknis, peneliti membawa dan menunjukkan kembali laporan akhir

atau deskripsi-deskripsi atau tema-tema khusus ke hadapan partisipan untuk mengecek dan memastikan apakah mereka merasa bahwa deskripsi atau tema-tema tersebut telah akurat. Hal ini bukan berarti bahwa, peneliti membawa kembali transkrip-transkrip kepada partisipan untuk mengecek akurasi (Amtai Alaslan, et al., 2023).

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan
1.	Informan 1	Kasi Pertamanan
2.	Informan 2	Masyarakat
3.	Informan 3	Masyarakat
4.	Informan 4	Pedagang Kaki Lima
5.	Informan 5	Pedanag Kaki Lima

Keterangan: (Rijal, 2024)

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhineka Karya No. 116, Karamat, Kec. Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43151.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan dan Pengawasan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang, bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Sukabumi merupakan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta pertanahan. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, serta pertanahan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Adapun sumber data yang menjadi bahan untuk peneliti yaitu Peraturan daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, diatur mengenai pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk pedestrian, untuk menjaga pedestrian dan keindahan lingkungan. Dengan adanya sumber data tersebut peneliti dapat mengetahui tata kelola kebersihan yang seharusnya dilakukan, sehingga untuk menindaklanjutinya peneliti akan mewawancarai pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi di bidang pertamanan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan tersebut.

Kebijakan adalah keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Penganut peran ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijakan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan (Bulamei, Elisabet Christin, 2017). Karena melalui kebijakanlah para pemangku kekuasaan (stakeholder) dapat melaksanakan perannya sesuai dengan legitimasinya. Peran sebagai suatu kebijakan dalam penelitian ini merupakan dimensi yang sangat penting, karena hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang memiliki kekuatan hukum dalam melaksanakan kewenangannya yang juga didukung oleh

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015.

Dalam implementasi kebijakan kebersihan, dinas ini terlibat dalam pemeliharaan fasilitas, manajemen sampah, dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Kolaborasi yang terjalin dengan pemerintah setempat, kelompok masyarakat dan pelaku usaha bertujuan untuk mencapai efektivitas optimal. Tantangan seperti kurangnya partisipasi masyarakat, perubahan perilaku, dan keterbatasan sumber daya juga teridentifikasi dalam penelitian ini. Namun, solusi konkret telah diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi bagian integral dari penelitian ini untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program yang diterapkan mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam Pengelolaan Kebersihan

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terbukti memegang peran yang signifikan dalam mengembangkan strategi tata kelola kebersihan. Melalui kebijakan dan implementasi tata ruang, dinas ini berkontribusi dalam menciptakan jalur pedestrian yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Penelitian ini memaparkan secara rinci bagaimana dinas tersebut menghadapi tantangan dalam menjaga kebersihan di jalur pedestrian. Strategi yang dikembangkan melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, pengelolaan sampah yang efektif, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peran penting menjaga kebersihan ruang publik. Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga

mencakup kolaborasi yang erat dengan pemangku kepentingan lain, seperti pemerintah setempat, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha di sekitar jalur pedestrian. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mengoptimalkan upaya tata kelola kebersihan. (Fatimah et al., 2021)

Evaluasi kinerja menjadi alat yang efektif dalam mengukur sejauh mana strategi yang diterapkan oleh dinas dapat mencapai tujuan kebersihan di jalur pedestrian Ir. H Djuanda. Evaluasi ini membantu identifikasi keberhasilan, serta potensi perbaikan dalam pengelolaan kebersihan di masa mendatang. Hasil penelitian ini memberikan pandangan komprehensif tentang peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam tata kelola kebersihan jalur pedestrian Ir. H Djuanda. Implikasinya dapat membantu pengembangan kebijakan yang lebih terarah dan efektif dalam menjaga kebersihan ruang publik di Kota Sukabumi.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang terbukti memelihara berbagai strategi komunikasi untuk menyampaikan informasi dan membangun kesadaran masyarakat. Mulai dari sosialisasi secara langsung hingga media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, peran komunikasi digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait tata kelola kebersihan, untuk melakukan pengaduan-pengaduan yang berkaitan dengan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menggunakan berbagai alat komunikasi untuk mengatasi tantangan dalam menjaga kebersihan di jalur pedestrian. Komunikasi efektif melalui

berbagai saluran menjadi kunci untuk melibatkan masyarakat, memperoleh dukungan, dan mengubah perilaku terkait kebersihan. Peran komunikasi tidak hanya sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan kolaboratif dengan pemangku kepentingan lain, termasuk pemerintah setempat, kelompok masyarakat, dan pelaku usaha. Komunikasi yang efektif menjadi fondasi yang kuat dalam mendukung keberlanjutan tata kelola kebersihan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebagai alat penyelesaian sengketa yang signifikan dalam tata kelola kebersihan di jalur pedestrian Ir. H Djuanda Kota Sukabumi. Hasil penelitian memberikan wawasan tentang bagaimana dinas ini berperan tidak hanya sebagai pengelola infrastruktur fisik, tetapi juga sebagai mediator yang efektif dalam menangani konflik terkait kebersihan dan berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa terkait kebersihan di jalur pedestrian. Melalui pendekatan komunikatif dan mediasi, dinas ini berhasil mengatasi perbedaan pandangan, konflik kepentingan, dan permasalahan terkait tata kelola kebersihan. Pendekatan kolaboratif ini menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian sengketa secara efektif. (Perbaikan et al., 2017)

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki topik serupa seperti perbedaan lokus dan penggunaan teori serta penggunaan metode yang berbeda menjadi kebaruan penelitian. Penelitian ini dikaji menggunakan teori arimbi dan dapat menganalisis peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi dalam tata kelola kebersihan.

D. KESIMPULAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi memegang peran penting dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan pedestrian di Jalan Ir. H. Djuanda, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008. Tugas utama dinas ini mencakup penyediaan fasilitas kebersihan, pengelolaan sampah, dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Penelitian ini mengungkap tantangan utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima dalam membuang sampah secara tepat. Untuk itu, diperlukan strategi lebih efektif, seperti sosialisasi yang intensif dan peningkatan media pengaduan yang responsif.

Menurut teori Arimbi, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dapat dilihat dari aspek kebijakan, strategi, komunikasi, dan penyelesaian sengketa. Dinas ini tidak hanya bertindak sebagai pengelola infrastruktur, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dalam menangani konflik kebersihan.

Secara keseluruhan, peran komprehensif dinas ini sangat krusial dalam mewujudkan pedestrian yang bersih dan nyaman di Kota Sukabumi. Upaya berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat koordinasi antar lembaga sangat diperlukan untuk mencapai tujuan menciptakan ruang publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Amtai Alaslan., Putra, A., Suharti, B., & Laxmi. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Tasikmalaya: Perkumpulann Rumah Cemerlang

Indonesia. hal. 17-30.

Astri Rahmawati Gunawan, Ike Rachmawati, dan Dine Meigawati, "Peran Dinas Perhubungan Dalam Tata Kelola Angkutan Umum Perkotaan Di Kota Sukabumi," *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 2, 24 September 2019, 102–108.

Bulamei, Elisabet Christin, dkk (2017) 'Kajian Komunikasi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dalam Meningkatkan Perbaikan Infrastruktur Kota Manado', *Acta Diurna*, 6, no. Available at: <https://www.neliti.com/id/publications/177442/kajian-komunikasi-pembangunan-dinas-pekerjaan-umum-dalam-meningkatkan-perbaikan#cite>.

Diana, P., Suwena, K., Made, N., Wijaya, S., Studi, P., Wisata, I. P., Pariwisata, F., Udayana, U., Bali, D., Penelitian, A., Mas, D., Peliatan, D., Bali, U., Dalam, M., Informan, P., Mas, D., Peliatan, D., Wikipedia, M., & Ri, K. (2017). *Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan*, *Ubud*. 17(2), 84–92.

Fatimah, S. et al. (2021) 'Di Kabupaten BonE', 2.

Hajar, S. 2022. *Pengantar Administrasi Publik*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin. Hal 2.

Hidayah, R., Solichah, N., Solehah, H. Y., & ... (2021). Persepsi dan peran guru terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus. ..., 18(2), 330–344. <http://repository.uin-malang.ac.id/10343/%0Ahttp://repos>

- itory.uin-
malang.ac.id/10343/2/10343.pdf
- Hendrayady, A., Arman, Djati, S. N., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusnadi, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In *Birokrasi Administrasi*.
- Jalaludin, Anggi. (2017). Peran Dinas kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Atlet di Kabupaten Sukabumi. Sukabumi : Skripsi Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
- Mahdalina. (2023). Peran Dinas Pertahanan Dan Lingkungan Hidup (Plh) Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Tpa Batu Merah Kecamatan Lampihong. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. Vol.2, No.5. hal 1805.
- Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87
- Perbaikan, M. et al. (2017) 'Kajian Komunikasi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Meningkatkan Perbaikan Infrastruktur Kota Manado', VI (3).
- Rahayu, S. (2022). Analisis Tingkat Kenyaman Jalur Pedestrian Di Jalan HR. Soebrantas Kota Pekanbaru. Skripsi. Universitas islam riau. pekanbaru.
- Syafiie, I. K. (2016). Ilmu Administrasi Publik. PT Rineka Cipta.
- Tua, D., Darma, P. 2021. Administrasi Publik. Purbalingga: CV Eurika Media Aksara. Hal 1-2.
- Viera Valencia, L. F., & Garcia Giraldo, D. (2019). No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2, 13–40.
- Wibowo, W., & Zainal, Z. (2020). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bengkalis Dalam Keamanan Pantai (Studi Di Pantai Pambang Pesisir Desa). *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 6(2), 38–53.
- Yalensy, R., Dkk. (2023). Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Dan Kebersihan di Kota Surabaya. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, Vol. 3. No 1. Hal 41.
- Yusna, S., Dkk. (2021). Peranan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*. Vol 3 (2). Hal 156.
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan,
- Peraturan Walikota Nomor 144 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.